

NASIONALISME DI DUNIA ISLAM

Oleh: Ajat Sudrajat*
Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY

Abstrak

Telah berabad-abad lamanya, model kesatuan politik yang bercorak imperium atau 'negara-dunia' menjadi dasar untuk mengatur kehidupan politik umat Islam. Sejak Nabi saw melembagakan Negara Madinah pada abad ke-7 sampai berakhirnya khilafah Turki Utsmani ada tahun 1924, pemerintahan Islam melingkupi berbagai bangsa dan golongan etnik. Akan tetapi pada seperempat abad pertama abad ke-19, nasionalisme dalam arti kata modern mulai menjadi isu yang secara kuat merasuki dunia Islam.

Melalui penelusuran metode historis, tulisan ini dibuka dengan melihat sosok dan pemikiran para pembaharu Islam awal seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dari serangkaian pemikirannya, kedua pembaharu tersebut ternyata telah mengembangkan pemikiran mengenai pentingnya kesatuan umat atau konsep Pan Islam dan mengembangkan sikap anti kolonial. Sejauh ini keduanya tetap menjadikan Islam atau agama sebagai kerangka dasarnya.

Berbeda dengan mentornya, para murid Afghani dan Abduh bergerak dalam garis yang berseberangan. Kesatuan umat yang mereka kembangkan tidak lagi mengacu pada agama sebagai unsur pokoknya, melainkan telah mendasarkan pada unsur-unsur formatif obyektif yang lain seperti sejarah dan bahasa. Sampai akhirnya dunia Islam terbagi ke dalam negara-negara nasional yang didasarkan entah karena faktor kesejarahan, kebudayaan, etnis, atau bahasa.

Kata Kunci: Islam, Nasionalisme.

Pendahuluan

Memasuki abad 20, sejarah mulai mencatat bangkitnya dua gerakan yang sangat berpengaruh di dunia Muslim kontemporer: (1) nasionalisme sekuler, yang berusaha memperoleh kemerdekaan dari para penguasa kolonial Eropa, dan berusaha untuk mengembangkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntutan abad modern, dan (2) gerakan Islam, yang memiliki tujuan sama dengan nasionalisme sekuler, tetapi berbeda dalam cara bagaimana masyarakat harus direformasikan.

*Ajat Sudrajat, Dr., M.Ag. Dosen pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yoyakarta, mengampu mata kuliah Sejarah Asia Barat dan Sejarah Pemikiran Islam.

Meskipun ada dua gerakan yang secara serentak bergerak di dunia Islam seperti disebutkan di atas, tetapi tulisan ini lebih menitik beratkan kepada gerakan yang pertama, yaitu mencoba menelusuri gerakan nasionalisme dan melihat pengaruhnya terhadap masyarakat Muslim.

Sebagaimana diketahui, pada akhir abad 19, kemunduran Kerajaan Usmani, sebagai penguasa dunia yang telah berlangsung kurang lebih selama lima ratus tahun, mulai digantikan. Kehadiran para penguasa kolonial Eropa dengan keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi dan militernya, mulai mendominasi kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Terkejut dengan keberhasilan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta militer Eropa, unsur-unsur dalam masyarakat Muslim berusaha mulai merespon ilmu pengetahuan dan teknologi mereka, dan rencana-rencana pembangunan pun diterapkan untuk memodernisasikan masyarakatnya. Usaha-usaha modernisasi ini telah dimulai pada awal abad 19 dalam bidang militer dan birokrasi oleh para penguasa Usmani.¹

Sejak berakhirnya Perang Dunia I, bangsa-bangsa Eropa secara praktis telah menjajah sebagian besar dunia Muslim: Inggris menguasai Mesir, Palestina, Trans-Jordan, Irak, Teluk Arab, Anak Benua India, dan Asia Tenggara; Prancis menguasai Afrika Barat dan Utara, Libanon dan Syria; dan Belanda menjajah Indonesia.² Dominasi asing ini telah membangunkan kesadaran umat Islam, dan banyak di antara mereka yang merasakan perlunya respon dari umat Islam untuk menghentikan stagnasi dan meneruskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan modernisasi seperti yang telah dilakukan negara-negara Eropa.

Gejala ini telah menimbulkan tiga kelompok pemikir dalam masyarakat Muslim, yaitu:

1. Kelompok sekularis, kelompok ini menyatakan bahwa apabila umat Islam ingin maju, maka ia harus meniru Barat dalam segala hal: pendidikan, politik,

¹John L. Esposito, *Islam and Politics*, Syracuse: Syracuse University Press, 1991, hlm. 44.

²John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, New York: Oxford University Press, 1992, hlm. 51.

hukum, lembaga-lembaga ekonomi, begitu juga dengan tradisi masyarakatnya. Kelompok ini merupakan minoritas elit yang biasanya memiliki latar belakang pendidikan Barat.

2. Kelompok tradisionalis, kelompok ini terdiri dari para ulama ortodok dan kalangan penduduk yang menolak segala sesuatu yang bercorak Barat, karena hal itu dirasakan sebagai ancaman bagi way of lifenya. Mayoritas umat Islam berada dalam kategori ini.
3. Kelompok reformis, kelompok ini merasakan bahwa, setelah melakukan interpretasi secara benar, Islam merupakan solusi bagi penyakit-penyakit umat Islam. Kemerostan dunia Muslim, mereka mengatakan, disebabkan oleh kegagalan umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang benar dan menekankan pada pemikiran-pemikiran hukum yang lama. Mereka juga menganjurkan pengambilan dengan cara selektif keberhasilan-keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dalam rangka memajukan umat Islam.

Dari kelompok-kelompok Muslim di atas, kelompok reformis atau pembaharu Islam bertindak sebagai penengah di antara kelompok sekuler yang kebarat-baratan dan mayoritas kalangan tradisionalis dalam masyarakat Muslim. Melalui pemikirannya, mereka telah berusaha untuk mendekatkan jarak antara dua kalangan yang bertentangan dengan akibat yang ditandai oleh sifat-sifat dari kedua kelompok tersebut.

Pembaharu Islam Awal dan Pemikirannya

Pembahasan ini akan dimulai dengan melihat sosok dan pemikiran Jamaluddin al-Afghani (1838-1897). Ia dilahirkan dan besekolah di Iran, kemudian di India dan Inggris. Ia merupakan seorang guru dan aktivis politik yang telah mengunjungi banyak negara Islam sejak dari India, Mesir, sampai ke Turki untuk mengajak umat Islam memperbaharui way of life mereka dan mengembalikan kejayaan Islam seperti masa lalu. Ia merupakan penganjur sikap anti-kolonial dan mengajak persatuan Islam trans-nasional (Pan Islam). Karena aktivitas-aktivitas politiknya, ia dideportasi dari Iran pada tahun 1891 berkaitan dengan kegiatannya menggerakkan massa untuk memprotes kebijakan Tembakau, dan kemudian ia diundang ke Istanbul oleh Sultan Usmani Abd

al-Hamid. Tetapi selang beberapa waktu di Istanbul, ia ditempatkan di rumah tahanan pada tahun 1896 disebabkan salah seorang pengikutnya telah membunuh raja Iran Nasir al-Din Shah.³

Perhatian utama Jamaluddin al-Afghani adalah pada Islam sebagai sebuah peradaban. Ia memahami peradaban seperti halnya pemikir Eropa, Guizot, yang mengatakan: pembangunan sosial dan industrial masyarakat. Manusia membentuk dunia ini atas dasar kecenderungan-kecenderungan pemikiran, keyakinan (kepercayaan), moral dan intelektual mereka. Masyarakat merupakan kumpulan pernyataan moral perorangan; pernyataan moral ini terdiri dari dua bagian: (1) akal dan keinginan manusia agar tindakan-tindakannya diatur oleh moral; (2) kesatuan, penerimaan oleh anggota masyarakat tentang pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip moral yang dihasilkan oleh akal.⁴

Definisi mengenai peradaban ini merupakan deskripsi dari *ummah* (bangsa Muslim) pada masa awal-awal Islam. Peradaban ini telah hilang dan jalan untuk merestorasinya adalah dengan memperolehnya kembali melalui ilmu pengetahuan dari Eropa, tetapi yang terpenting dari semua itu adalah untuk mencapai kembali kesatuan *ummah*.⁵ Afghani meyakini bahwa solidaritas *ummah* hanya dapat dicapai apabila umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang benar dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka.

Pesan Afghani tentang perubahan dan solidaritas Pan-Islam di atas ditanamkan pada gerakan-gerakan kemerdekaan di negara-negara Muslim dan membangkitkan mereka dari kejumudan. Pesan pembaharuan tersebut dilanjutkan dan dikembangkan oleh murid al-Afghani yaitu, Muhammad Abduh (1849-1905). Apabila dalam gerakan ini Afghani lebih merupakan seorang aktivis politik, Abduh merupakan profil intelektual dan aktivis sosial. Abduh telah membantu Afghani dalam menyampaikan gagasan pembaharuan dan sikap anti-kolonialnya melalui penerbitan majalah dari Paris, tetapi

³ *Ibid.*, 56.

⁴ Albert Hourani, *Arabic Thought in Liberal Age: 1798-1939*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, hlm. 115.

⁵ *Ibid.*

kemudian mereka berdua diusir karena keterlibatannya dalam pemberontakan di Mesir. Kemudian pada tahun 1888, Abduh kembali dari pengasingan ke Kairo, dan mulai memusatkan perhatiannya kepada pembaharuan dalam bidang intelektual dan sosial. Selama tahun-tahun ini ia menganjurkan perlunya penafsiran kembali terhadap Islam dan lembaga-lembaga historisnya sesuai dengan akal dan ilmu pengetahuan modern.

Abduh merupakan seorang pembaharu yang mencoba merekonsiliasikan Islam dengan masa modern dan menjembatani jarak antara kelompok sekularis dan tradisional dengan memberikan interpretasi baru terhadap Islam yang cocok dengan konteks modern. Ia meyakini Islam merupakan jalan tengah antara kecenderungan materialistik dan sekularistik di satu pihak serta penafsiran-penafsiran tekstualis dan mistik oleh sejumlah kalangan tradisional di pihak lain. Islam sepenuhnya cocok dengan akal dan ilmu pengetahuan modern, dan apabila ditafsirkan secara benar, akan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang terjadi pada era modern.⁶

Dari sketsa pandangan dua tokoh Islam di atas dapat digariskan: *pertama*, keduanya melihat masa lalu dan yang akan datang dengan menganjurkan kebanggaan pada kejayaan peradaban Islam masa lalu, tetapi tetap mengedepankan dinamika, kemajuan dan ciri rasional Islam.⁷ *Kedua*, menyepakati relevansi dan kesesuaian Islam dengan abad modern. Keduanya tidak pernah mempertanyakan otoritas al-Qur'an dan Sunnah, tetapi mengkritik kebiasaan yang sudah ketinggalan zaman dan penafsiran para ulama tradisional. Mereka meyakini apabila penafsiran yang sebelumnya ini diadopsi melalui konsensus umat Islam pada waktu itu, mengapa tidak merevisinya dan memperbaharui penafsiran itu sehingga sesuai untuk konteks modern?⁸ *Ketiga*, sikap anti-kolonial dan konsep Pan-Islam mereka menjadi pendorong gerakan-gerakan kemerdekaan sepanjang dunia Islam.

Perkembangan Nasionalisme di Dunia Islam

⁶Hourani, *op.cit.*, hlm. 143-144.

⁷John L. Esposito, *Islam...*, hlm. 57.

⁸Lichtenstader, Ilse, *Islam and Modern Age*, New York: New York University Press, 1950, hlm. 181.

Seperti telah disebutkan di atas, prestasi yang menonjol dari para pembaharu Islam seperti Afghani, telah merangsang bangsa-bangsa Muslim untuk memberontak terhadap dominasi Eropa. Setelah Perang Dunia I, dengan runtuhnya Kerajaan Usmani dan munculnya negara bangsa Muslim modern, perlawanan terhadap kolonialisme Eropa mengambil bentuk nasionalisme, menggantikan gerakan solidaritas Pan-Islam. Gerakan nasionalistik ini mulai menekankan faktor-faktor nasional, sejarah dan kebahasaan yang berbeda dengan kesatuan keagamaan.⁹ Lebih jauh gerakan ini telah berbelok arah dari pembaharuan Islam yang telah dirintis dan dimulai oleh Afghani dan Abduh, dan mulai mengarah pada pendekatan-pendekatan yang lebih sekuler dalam memperbaharui masyarakat mereka.

Nasionalisme berbeda jauh dengan konsep Pan-Islam yang dipromosikan oleh Jamaluddin al-Afghani. Persatuan Islam yang dikehendaki oleh Afghani adalah adanya solidaritas dunia Islam dalam menghadapi dan sekaligus menggalang kekuatan untuk mengusir kolonialisme Barat yang melanda dunia Islam. Nasionalisme yang mendasarkan unsur-unsur formatif di luar agama dengan demikian merupakan konsep yang baru dalam dunia Islam. Dengan demikian ada yang berpendapat bahwa nasionalisme adalah produk yang diimpor dan sengaja diekspor oleh para penguasa kolonial untuk mengacaukan persatuan di dunia Islam.¹⁰

Seperti terlihat dari asal katanya, nasionalisme berasal dari kata *naita* atau *naitas* yang berarti tempat kelahiran. Berbicara mengenai kebangsaan berarti berbicara tentang tanah kelahiran. Tetapi secara perlahan, kata *nation* digunakan sebagai suatu konsep dalam ilmu sosiologi dan politik, dengan pengertian yang lebih luas. Dalam ilmu politik misalnya, kata ini dipakai untuk menunjuk pada penduduk dalam suatu wilayah geografis yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang sama. Pada saat yang sama, kata ini dipakai juga untuk menunjuk pada adanya identitas yang sama. Konsep yang

⁹Kemal H. Karpat (ed.), *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East*, New York: Praeger Publisher, 1982, hlm. xxiv.

¹⁰Ali Mohammed Naqvi, *Islam and Nationalism*, <http://www.al-islam.org/islamandnationalism/9.htm>, akses Internet, 15 Februari 2008.

diasosiasikan dengan nation adalah negara (*state*), yang biasanya juga menunjuk pada wilayah teritorial atau tanah di mana bangsa itu dihubungkan.¹¹

Tulisan ini selanjutnya akan membatasi pembahasannya dengan melihat pemikiran beberapa tokoh Mesir yang merupakan murid Afghani dan Abduh. Kemudian akan dibahas bagaimana Gerakan Nasionalis Mesir sekuler memberikan jalan pada Nasionalisme Arab secara lebih luas.

Lutfi Al-Sayyid (1872-1963). Ia memperoleh pendidikan awalnya di sebuah sekolah al-Qur'an. Kemudian melanjutkan ke sekolah dasar modern di Mesir dan seterusnya masuk ke Fakultas Hukum. Selama berada di Fakultas Hukum, ia bertemu dengan Muhammad Abduh dan menjadi muridnya. Setelah lulus, selama beberapa tahun ia menjadi pegawai pemerintah, ketika itulah ia mengenal pemikiran-pemikiran Eropa. Setelah menjadi pegawai pemerintah, kemudian ia membentuk *People's Party* (Partai Rakyat) dan menjadi editor majalah *Al-Jaridah*, yang telah banyak mempengaruhi kaum terpelajar Mesir. Ketika penerbitan *Al-Jaridah* dihentikan pada tahun 1915, Lutfi bekerja sebagai profesor filsafat di Universitas Mesir (sekarang Universitas Kairo) dan kemudian menjadi rektor.

Tidak seperti mentornya, Afghani dan Abduh, agama tidak memainkan peran yang besar dalam pemikiran Lutfi. Islam, bagi Lutfi, semata hanya merupakan unsur utama bagi masyarakat penganutnya. Ia lebih tertarik dengan kelangsungan hidup dan kemajuan masyarakat secara umum. Pemikiran utamanya yang ia kembangkan berasal dari pemikiran Barat, yaitu kebebasan. Ia meyakini bahwa kebebasan tidak hanya diperlukan dalam tindakan politik, tetapi kebebasan juga diperlukan dalam kehidupan secara umum. Oleh karena itu, pemerintah sewajarnya memiliki dan menjadi satu kekuatan dengan kontrol yang kuat untuk mempertahankan keamanan dan keadilan serta mempertahankan rakyat dari serangan musuh.¹²

Bangsa Mesir merupakan fokus dari pemikiran Lutfi, ia mendefinisikan Mesir dan nasionalisme Mesir tidak dalam pengertian bahasa dan agama --Arab dan Islam--

¹¹Ibraheem Yaqoub El-Zakzaky, "Nationalisme", <http://www.islamicmovement.org/nationalism.htm#introduction>, akses Internet, 15 Februari 2008.

¹² Hourani, *op.cit.*, hlm. 174.

melainkan dalam pengertian teritorial dan sejarah Mesir. Ia menganjurkan agar orang-orang Mesir mempelajari sejarah Pharaoh dan Arab lama, untuk membantu mendefinisikan siapa sebenarnya diri mereka. Selain itu, Lutfi meyakini bahwa ide umat Islam tidak relevan lagi dengan masa sekarang dan bahwa solidaritas Islam merupakan ide yang dimunculkan oleh kolonialis Eropa, untuk melumpuhkan perjuangan nasional orang-orang Mesir.¹³

Nasionalis Mesir yang lain adalah **Sa'd Zaghul (1857-1927)**. Ia mendapat pendidikan di Universitas Al-Azhar, kemudian bertemu dengan Afghani dan menjadi muridnya. Pada tahun 1892, ia tertarik untuk menjadi hakim, dan dijalaninya selama empat belas tahun. Selama masa tersebut, ia berusaha keras untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum dan kelembagaan masyarakat Mesir agar sesuai dengan zaman modern. Pada tahun 1906, ketika Inggris menerapkan suatu rencana pemerintahan representatif, sesuatu yang sangat tidak disukai oleh kalangan monarki Mesir, Zaghul diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Ia menempati jabatan selama empat tahun, dan banyak membawa perubahan dalam bidang pendidikan.

Pada tahun 1910, ia dipromosikan untuk menjadi Menteri Kehakiman, suatu kedudukan yang kemudian ia tinggalkan pada tahun 1913 untuk suatu kedudukan di Dewan Legislatif Baru. Dewan ini kemudian dibekukan ketika pecah Perang Dunia I, tetapi setelah peperangan, pada tahun 1918 Zaghul dan para aktivis Mesir lainnya membentuk suatu delegasi (*wafd*), yang akan menghadiri Konferensi Perdamaian Prancis dan akan membicarakan tentang kemerdekaan Mesir. Akan tetapi delegasi itu ditolak untuk menghadiri konferensi oleh Komisi Tinggi Inggris untuk Mesir, Zaghul kemudian ditahan dan dideportasi ke Malta. Ketika kerusuhan terjadi di Mesir dan Komisi baru diangkat, ia dan teman-temannya diizinkan untuk pergi ke Paris dan melakukan pembelaan atas kasus mereka. Pada awalnya pembicaraan itu mengalami kegagalan, tetapi akhirnya memberikan batas waktu kemerdekaan bagi Mesir hingga tahun 1922, dengan tetap melindungi kepentingan Inggris.

¹³*Ibid.*, hm. 178.

Pada tahun 1923, Partai Wafd memenangkan pemilihan parlemen dan Zaghlul pun diangkat sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi tidak lama kemudian ia dipaksa berhenti karena adanya kerusuhan internal di Mesir dengan Inggris. Dengan demikian, perjalanan hidup Zaghlul dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu kehidupannya sebelum Perang Dunia I sebagai hakim yang pembaharu, dan setelah Perang Dunia I sebagai aktivis dan pemimpin politik.

Pada periode sebelum perang, ia berusaha memperbaharui bidang kehakiman dan pendidikan, dan mendirikan sekolah untuk hakim-hakim syari'ah serta memberinya pelatihan-pelatihan modern. Setelah masa peperangan, sebagai seorang pemimpin politik, Zaghlul kurang memperhatikan pembaharuan internal, sebagaimana perhatiannya dengan kemerdekaan Mesir dari Inggris dan pembatasan wewenang monarki. Pada tahap kehidupannya ini, ia mulai bergerak jauh dari misi pembaharuan yang dilakukan Abduh, dan menganjurkan kemerdekaan politik dan persatuan Mesir yang didasarkan pada sentimen nasional dari pada didasarkan pada garis keagamaan.¹⁴

Ali Abd al-Raziq (1888-1966). Untuk menyoroti perkembangan lebih lanjut di Mesir, akan dilihat murid Abduh yang lain, yaitu Ali Abd al-Raziq. Meskipun ia tidak berbicara mengenai nasionalisme, apa yang ia bicarakan perlu untuk dikemukakan karena berkaitan dengan kelembagaan penting dalam Islam, yaitu keberadaan lembaga politik (pemerintahan atau negara Islam). Pada tahun 1925, Abd al-Raziq menerbitkan karyanya tentang pemerintahan Islam. Tema utama dari karyanya ini adalah menyerang tentang lembaga kekhalfahan dan lebih utama lagi adalah mengenai dasar-dasar otoritas politik Islam tersebut.

Dalam bukunya ia menyatakan bahwa al-Qur'an tidak pernah mengindikasikan atau menyatakan secara implisit lembaga kekhalfahan dan bahwa Nabi SAW tidak pernah bermaksud membangun pemerintahan Islam karena misinya semata merupakan petunjuk spiritual. Aktivitas Nabi tidak lebih daripada menyampaikan risalah yang bebas dari semua pengertian otoritas. Al-Quran secara tegas melarang Nabi untuk bertindak

¹⁴*Ibid.*, hlm. 214.

sebagai seorang penjaga manusia, atau pengawas mereka, atau sebagai seorang penakluk, atau seorang penguasa. Nabi bukanlah seorang penguasa atau raja, karena prasyarat untuk sebuah kerajaan atau pemerintahan adalah dominasi dan kekuatan yang menentukan otoritas tanpa batas. Muhammad SAW tidaklah memiliki hak terhadap rakyatnya kecuali menyampaikan risalah. Ia hanyalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul lainnya yang terdahulu.¹⁵

Lebih jauh, Abd al-Raziq menegaskan bahwa lembaga kekhalifahan secara keliru telah dilembagakan oleh para sahabatnya setelah wafatnya beliau. Bukti dari keadaan ini adalah bahwa Nabi tidak pernah menunjuk pengganti sebelum wafatnya. Secara ideal tidak ada khalifah atau otoritas politik Islam apa pun dalam Islam.¹⁶ Sesungguhnya sangat masuk akal apabila dunia dapat menganut satu agama dan bahwa semua umat manusia dapat diatur ke dalam satu kesatuan agama. Namun, kepegangan seluruh dunia pada satu pemerintahan dan dikelompokkan pada satu kesatuan politik dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dasar manusia dan tidak berhubungan dengan kehendak Tuhan. Kebijakan Tuhan dalam dalam tujuan yang bersifat duniawi adalah memelihara perbedaan-perbedaan di antara mereka.¹⁷

Karena kedudukan yang sensitif dari masyarakat Muslim pada waktu karya itu diterbitkan --Turki telah menghapuskan sistem kekhalifahan pada tahun 1924-- Al-Raziq dengan dahsyat dicela oleh ulama-ulama Al-Azhar dan beberapa diantaranya menjulukinya sebagai usaha paling akhir yang dilakukan musuh-musuh Islam untuk memecah belah dan menghancurkan komunitas Islam. Al-Raziq pun dipecat dari kedudukannya sebagai hakim dan dosen al-Azhar dan mendapat kritik yang tajam dari Rasyid Ridla, murid Abduh yang lain.

Sampai tingkat ini diketahui bahwa beberapa murid Afghani dan Abduh telah menyimpang dari kemurnian sikap reformis Islam kepada pemikiran nasionalis dan

¹⁵Ali Abd al-Raziq, "Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara", dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 11

¹⁶*Ibid.*, hlm. 3.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 15.

sekuler. Dengan semua keberhasilan usaha-usaha Afghani dan Abduh, kegagalan murid-muridnya untuk mengikuti jalan pikiran mereka, berarti merupakan kegagalan mereka untuk menghasilkan organisasi yang secara sistematis mengembangkan dan menerapkan pemikiran mereka.¹⁸

Kemerdekaan dan Naiknya Golongan Nasionalis

Sebagai akibat dari perkembangan di Mesir, pada akhir abad 19, gerakan sekuler yang lain berkembang di luar Mesir, dan kemudian mempengaruhi suasana politiknya. Gerakan tersebut adalah gerakan Nasionalisme Arab yang berkembang di Syria dan berhasil menciptakan ketenangan pada masyarakat Arab. Bangkitnya Nasionalisme Arab ini disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran Arab sebagai akibat dari penindasan penguasa Turki pada akhir abad 19. Perkembangan despotisme Sultan Abdul Hamid pada akhir pemerintahannya telah membantu mempercepat orang-orang Arab terpanggil untuk memperbaharui Kerajaan Usmani. Tuntutan untuk melakukan pembaharuan adalah berupa otonomi propinsi-propinsi Arab yang berada dalam lingkungan Kerajaan Usmani. Pada tahun 1908, ketika Sultan Abdul Hamid digulingkan, lembaga Parlemerter yang dikenal sebagai *Committe of Union and Progress* (Komite Persatuan dan Kemajuan) dilembagakan untuk mengorganisasikan kerajaan.

Tidak lama setelah Komite ini dibentuk, terjadi konflik politik antara lembaga Parlemerter dengan kelompok-kelompok etnis yang ada dalam wilayah kerajaan. Konstituen etnik dalam wilayah kerajaan berharap bahwa pemerintah yang baru akan memberikan jaminan otonomi yang lebih luas, tetapi kebijakan Komite justru bertolak belakang dengan keinginan mereka, yaitu melakukan upaya sentralisasi. Komite, yang terdiri dari kalangan Nasionalis Turki, menyadari bahwa hanya kelompok tertentu yang bisa menerima kebijakan mereka, yaitu orang-orang Turki. Karena itu, dengan bersandar pada Nasionalisme Turki, mereka membuat kebijakan Turkifikasi untuk melaksanakan tujuan-tujuan mereka.¹⁹

¹⁸ John L. Esposito, *The Islamic..*, hlm. 61.

¹⁹ Zeine N. Zeine, *The Emergence of Arab Nasionalism: With a Background Study of Arab-Turkish Relation in the Near East*, New York: Caravan Books, 1973, hlm. 75.

Kebijakan Turkifikasi yang berusaha menekankan bahasa Turki pada elemen-elemen non-Turki di dalam wilayah kerajaan telah menimbulkan kemarahan orang-orang Arab dan mengintensifkan panggilan mereka untuk melakukan pembaharuan. Kongres Arab tahun 1913, yang diselenggarakan di Paris, menuntut perwakilan yang proporsional di dalam Komite pemerintahan propinsi-propinsi Arab, dan pengakuan bahasa Arab sama seperti bahasa Turki di dalam propinsi Arab.²⁰

Setelah gagal untuk mencapai kompromi, kalangan Nasionalis Arab, dengan dukungan dari Inggris, mulai terpanggil untuk memerdekakan diri. Tujuan panggilan kemerdekaan ini adalah dengan membentuk Persatuan Negara Arab yang dikepalai oleh seorang pemimpin. Negara ini akan meliputi semua wilayah Semenanjung Arabia, Syria dan Irak. Harus dicatat di sini bahwa Mesir dan negara-negara Afrika Utara pada mulanya tidak dimasukkan sebagai bagian Arab oleh kalangan Nasionalis Arab ini.

Setelah peperangan berlangsung Kerajaan Usmani dibubarkan, dan sebagian besar propinsi-propinsi Arab berada di bawah sistem mandat Eropa: Syria dan Libanon di bawah kekuasaan Prancis; Irak, Palestina dan Jordan berada di bawah kekuasaan Inggris. Sistem ini lebih jauh telah melanggengkan sentimen nasionalis Arab dalam negeri seperti Syria dan Irak. Tetapi pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah, bagaimana Mesir masuk ke dalam lingkaran Arab?

Seperti telah dinyatakan di atas, pada awalnya kalangan nasionalis Arab tidak memasukan negara-negara Afrika Utara ke dalam lingkaran Arab dan hanya melihat Arab-Asia sebagai bagian dari negara Arab. Tidak sampai masa dari seorang nasionalis Syria yang bernama Sati Al-Husri bahwa bangsa Arab didefinisikan kembali. Husri menyatakan bahwa bangsa Arab terdiri dari orang-orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab, tanpa memperhatikan negara dan agamanya.²¹ Pada saat itulah secara

²⁰ Bassam Tibi , *Arab Nationalism*, New York: St. Maria Press, 1983, hlm. 68-78.

²¹ Sati al-Husri, "The Historical Factor in the Formation of Nationalism", dalam Kemal H. Karpat (ed.), *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East*, New York: Praeger Publisher, 1982, hlm. 39. Lihat juga Hourani, *op.cit.*, pp. 312-313.

teoritis Mesir menjadi bagian dari dunia Arab. Dengan demikian nasionalisme yang ditekankan Husri adalah nasionalisme yang di dasarkan pada kebahasaan.

Harus diingat bahwa ketika Al-Husri mengembangkan pemikiran ini, nasionalisme Mesir masih kuat di Mesir dan pemikirannya tidak segera memperoleh pengakuan dari orang-orang Mesir. Ia membaikot demokrasi liberal nasionalisme Mesir seperti Lutfi al-Sayyid dan Taha Husein, yang menerima ideal-ideal Eropa tanpa pengecualian. Melalui usaha-usaha pendidikan rasionalnya sebagai Direktur Institut Studi Arab dalam waktu singkat telah mendirikan Liga Arab, pemikiran Husri berhasil menembus segmen-segmen tertentu dalam masyarakat Mesir.

Secara resmi, nasionalisme kearaban tidak masuk ke dalam politik Mesir sampai terjadinya revolusi “Free Officers” yang terjadi pada tahun 1952. Free Officers ini merupakan anggota-anggota militer yang menggulingkan monarki Mesir dan membentuk suatu pemerintahan militer. Mereka kemudian mendukung pandangan-pandangan dan konsisten dengan nasionalisme Arab. Tidak begitu jelas bagaimana nasionalisme Arab bisa menjadi populer di dalam segmen ini di Mesir, tetapi setelah revolusi, Mesir menjadi juru bicara dari gerakan nasionalisme Arab ini.²²

Kesimpulan

Perkembangan ide dan konsep nasionalisme terus menerus diperdebatkan sepanjang dunia Muslim. Ini merupakan isu yang senantiasa hangat dibicarakan sejak dari Maroko sampai Malaysia. Selama tahun lima puluhan akhir dan awal enam puluhan, ketika bangsa-bangsa Muslim mulai memperoleh kemerdekaannya dari para penguasa kolonial, ideologi Nasionalis Sekuler menembus pemikiran elit penguasa. Tetapi ketika kemerdekaan itu dicapai dan kalangan elit ini gagal melakukan perubahan untuk memecahkan persoalan kebangsaan mereka, masyarakat kembali menengok Islam sebagai solusinya.

Sepanjang perjuangannya yang panjang di dunia Muslim, bentuk dan intensitasnya sangat beragam dari satu negara ke negara lain dan dari satu periode ke

²² *Ibid.*, hlm. 316.

periode yang lain, tetapi satu faktornya tetap sama, persoalan ideologi yang sesuai bagi kehidupan modern. Kalangan sekularis dan nasionalis menyatakan bahwa apabila masyarakat Muslim mau bertahan hidup, maka ia harus mengadopsi perspektif modern (Barat). Di sisi lain, kalangan revivalis Islam terpanggil untuk mempertahankan pandangan dunia Islam. Meskipun kelompok-kelompok Islam ini tidak monolitik, dalam pengertian metode dan pemikirannya, satu posisi yang dianjurkan oleh semua kelompok Islam adalah: kembali kepada way of life Islam dengan menegakkan syari'ah Islam. Dimanapun di dunia ini, umat Islam akan berusaha keras dengan pertanyaan apakah mempertahankan identitas Islam atau memadukannya ke dalam realitas modern. Hal ini merupakan isu yang kritis karena dunia Islam telah berada di abad 20, dan terus akan menjadi perdebatan di abad 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Esposito, J.L. (1991). *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press.
- (1992). *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, New York: Oxford University Press.
- Hourani, Albert. (1983). *Arabic Thought in Liberal Age: 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- al-Husri, Sati. (1982). "The Historical Factor in the Formation of Nationalism", dalam Kemal H. Karpat (ed.). *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East*. New York: Praeger Publisher.
- Karpat, Kemal H. (ed.). (1982). *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East*. New York: Praeger Publisher.
- Lichtenstader, Ilse. (1950). *Islam and Modern Age*. New York: New York University Press.
- Naqvi, Ali Mohammed. "Islam and Nationalism". <http://www.al-islam.org/islamandnationalism/9.htm>, akses Internet, 15 Februari 2008.
- al-Raziq, Ali Abd. "Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara", dalam Charles Kurzman (ed.), (2001). *Wacana Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Gloal*. Jakarta: Paramadina.
- Tibi, Bassam. (1983). *Arab Nationalism*. New York: St. Maria Press.
- El-Zakzaky, Ibraheem Yaqoub, "Nationalisme", <http://www.islamicmovement.org/nationalism.htm#introduction>, akses Internet, 15 Februari 2008.
- Zeine, Zeine N. (1973). *The Emergence of Arab Nasionalism: With a Background Study of Arab-Turkish Relation in the Near East*. New York: Caravan Books.